

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA
TAHUN 2021 – 2026



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dapat menyusun Rencana Strategis tahun 2021 – 2026.

Renstra ini merupakan acuan atau pedoman dalam pencapaian kinerja Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi periode tahun 2021 – 2026.

Mudah-mudahan Renstra ini dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 2022

Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sukabumi



USMAN JAELANI, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19641207 199503 1 001



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan	I-10
1.4. Sistematika Penulisan	I-12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-6
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	III-9
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-28
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	III-30



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, peningkatan daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut, pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang termuat baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan SKPD diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang dimuat dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Dalam Rangka Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja



Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4).

Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sukabumi secara umum mengalami peningkatan angka pengangguran yang tinggi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi hampir sepanjang tahun 2020, hal tersebut menyebabkan penurunan aktivitas



produksi di beberapa lapangan usaha, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran akibat pembatasan aktivitas dan banyak perusahaan yang melakukan PHK dalam jumlah besar, seperti yang terlihat dari meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tahun 2018 sebesar 7,77% dan tahun 2019 sebesar 7,99% menjadi 9,60% pada tahun 2020. Oleh karenanya diperlukan upaya penanganan pengangguran baik melalui perluasan kesempatan kerja maupun peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja serta mengupayakan hubungan industrial yang harmonis guna meminimalisasi PHK. Pada kenyataannya, menangani pengangguran harus berfokus pula pada upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok seperti buruh tani dan petani penggarap, nelayan, buruh industri kecil dan sektor UMKM. Upaya pengurangan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru, dan yang kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan pasar tenaga kerja. Isu-isu terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi merupakan tugas yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu untuk menyusun Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026. Dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi ini tidak lepas dari Renstra K/L dan Renstra Daerah



Provinsi Jawa Barat serta menjadi pedoman bagi penyusunan renstra di Kabupaten/Kota, dengan demikian antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota mempunyai program yang saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi, 2021 – 2026, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dengan dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi masa bhakti 2021 – 2024. maka visi dan misi yang disampaikan dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi.

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi ini merupakan suatu upaya dan proses yang dilakukan agar dapat mewujudkan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Peran dan kapasitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi yang diberi tugas dalam Meningkatkan Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi menentukan arah pembangunan di daerah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Dengan demikian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dapat menunjukkan eksistensinya sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kepada masyarakat (Public Goods) secara profesional dan transparan.



1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid 19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 No 7, Tambahan Lembaran Daerah No 236);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 No 8, Tambahan Lembaran Daerah No 237);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025; dan
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032;



29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.
31. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 75 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dalam pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi yang tertuang dalam Renstra 2021 -2026 yaitu :

Visi Kabupaten Sukabumi

"Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin"

Misi Kabupaten Sukabumi

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan;
3. Meningkatkan Konektivitas Untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah;



4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel.

1.3.1. Maksud

Renstra Disnakertrans ditetapkan sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi yang memuat kebijakan keuangan, kebijakan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dengan maksud :

- a. Arah pembangunan Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2021-2026;
- b. Tolak ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing – masing.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Renstra Disnakertrans Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur selama 1 (satu) tahun;
- b. Menjamin konsistensi perencanaan program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan arahan strategis Visi dan Misi pasangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Nomor 04 Tahun 2021;
- c. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun sebagai bahan



masuk dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 disusun dengan Sitematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih



- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Mengacu Pada Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 75 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, dengan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi sebagaimana dijabarkan di bawah ini :

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi adalah melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi mempunyai kedudukan dan Tugas Pokok sebagai berikut :

- 1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;



- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan, bidang penempatan tenaga kerja, bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, bidang hubungan industrial, bidang transmigrasi; kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
- d. Penerbitan izin/rekomendasi teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan dinas dan perangkat daerah terkait;
- f. Pembinaan administrasi di lingkungan dinas;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Susunan Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :

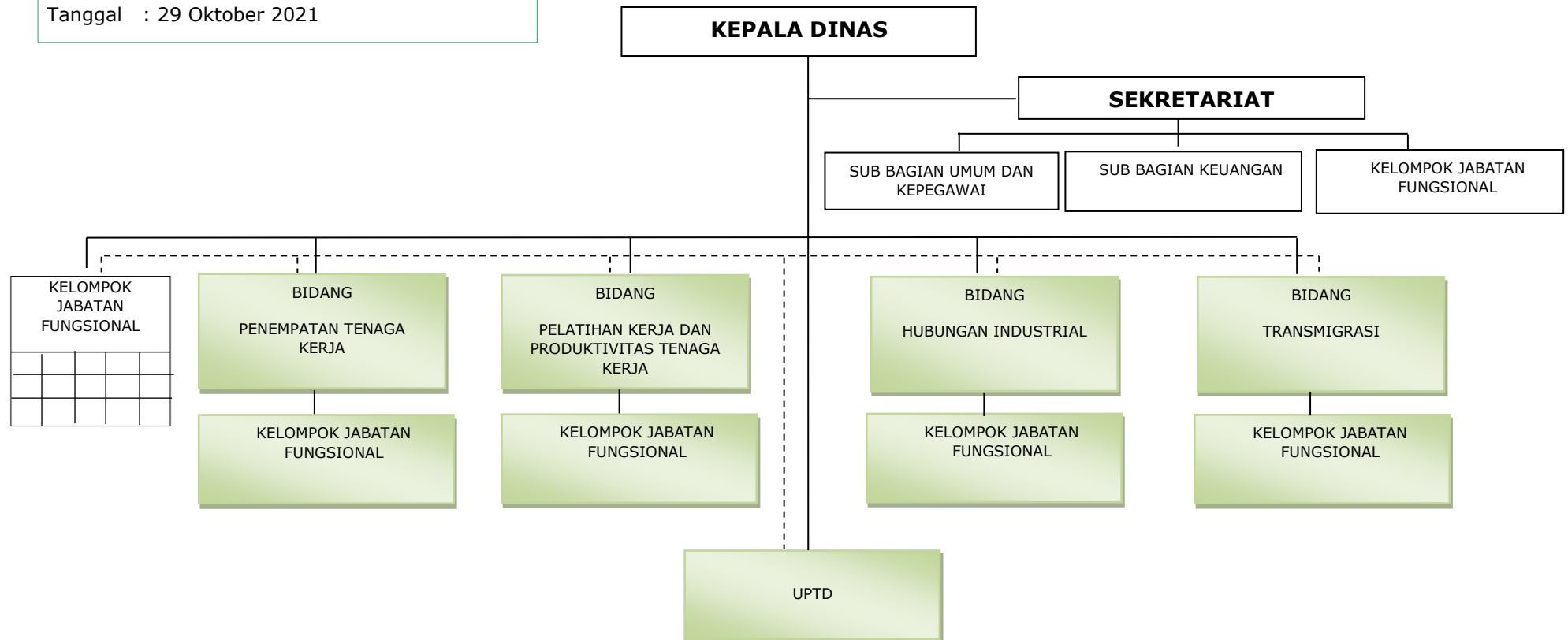


1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Hubungan Industrial, membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Transmigrasi, membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi

Lampiran : Peraturan Bupati Sukabumi
Nomor : 75 Tahun 2021
Tanggal : 29 Oktober 2021





2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia / pegawai yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, sekaligus sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun disadari, bahwa kualitas sumberdaya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan dan masih kurang terutama untuk jabatan fungsional mediator ketenagakerjaan dan fungsional pengantar kerja.

Komposisi Sumber Daya Manusia jabatan dalam struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi berdasarkan peraturan Bupati tersebut di atas akan disajikan ke dalam tabel di bawah ini:



Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai
Berdasarkan Jenis Kelamin Per Januari 2021

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretariat	6	6	12
3.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja	10	1	11
4.	Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	7	-	7
5.	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4	3	7
6.	Bidang Transmigrasi	5	1	6
7.	UPT BLK	22	5	27
Jumlah Total		55	16	71



Tabel 2.3

**Rekapitulasi Pegawai
Berdasarkan Golongan Per Januari 2021**

No	Unit Kerja	Jumlah ASN	Golongan															
			I				II				III				IV			
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.	Sekretariat	12	-	-	-	-	-	-	4	-	1	2	1	2	1	1	-	-
3.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja	11	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	1	2	1	-	-	-
4.	Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-
5.	Bidang Bina Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-	-	-
6.	Bidang Transmigrasi	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	-	-	-
7.	UPTD BLK	27	-	-	-	-	-	-	10	4	1	2	1	5	-	4	-	-
Jumlah Total		71	-	-	-	-	-	-	17	4	4	10	6	17	7	5	1	-



Tabel 2.4

**Rekapitulasi Pegawai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Januari 2021**

No	Unit Kerja	Golongan									Keterangan
		SD	SMP	SLTA	D.I	D.II	D.III	S.1	S.2	S.3	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
2.	Sekretariat	-	-	4	-	-	-	4	4	-	
3.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja	-	-	6	-	-	-	4	1	-	
4.	Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	-	-	2	-	-	-	3	2	-	
5.	Bidang Bina Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	1	-	-	-	4	2	-	
6.	Bidang Transmigrasi	-	-	2	-	-	-	3	1	-	
7.	UPTD BLK	-	-	-	-	-	16	9	2	-	
Jumlah Total		-	-	15	-	-	16	27	13	-	



b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam jumlah tertentu di setiap unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memiliki peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Meskipun demikian, secara kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan tersebut belum dapat dicapai secara optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi.

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi akan disajikan ke dalam tabel di bawah ini :



Tabel 2.5

Daftar Aset Tetap
Gedung dan Bangunan Per Desember 2020

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
	Bangunan Gedung		
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Pelabuhan II Km. 6 No. 703 Sukabumi	70,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Pelabuhan II Km.6 No. 703 Sukabumi	137,20
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Pelabuhan Km.6 No. 703 Sukabumi	66,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	JL. PELABUHAN II KM. 6 NO. 703 SUKABUMI	322,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Pelabuhan II Km. 6 No. 703 Sukabumi	590,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Pelabuhan II Km.6 No.703 Sukabumi	402,00
	- Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Jl. Plabuhan II Kota SMI Kab. Sukabumi	57,53
	- Bangunan Bengkel Permanen	Badan Diklat Jl. Raya Kadupugur Km 10,4 Cicantayan Sukabumi	36,00
	- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Semi Permanen	Badan Diklat Jl. Raya Kadupugur Km 10,4 Cicantayan Sukabumi	312,00
	- Gedung Garasi/Pool Permanen	Jl. Raya Kadupugur Km. 10,4 Cicantayan Sukabumi	80,00
	- Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Jl. Pelabuhan II Km. 6 No. 703 Sukabumu	176,32
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Badan Diklat Jl. Raya Kadupugur Km 10,4 Cicantayan Sukabumi	260,00



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026

	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Badan Diklat Jl. Raya Kadupugur Km 10,4 Cicantayan Sukabumi	670,00
	- Bangunan Taman	Jl. Plabuhan II Kota SMI Kab. Sukabumi	80,50
	Pertamanan		
	- Bloomenbak	Jl. Plabuhan II Kota SMI Kab. Sukabumi	278,00



Tabel 2.5

Daftar Aset Tetap
Peralatan dan Mesin Per Desember 2020

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.825
	Alat-alat Besar	1
	- Pompa Lain-lain	1
	Alat-alat Angkutan	36
	- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	6
	- Mobil Unit Panggung	1
	- Sepeda Motor	29
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.529
	- Mesin Bubut	1
	- Mesin Press	3
	- Mesin Ketam	4
	- Mesin Pres Hidrolik & Punsh	2
	- Mesin Bor	23
	- Mesin Kompresor	1
	- Mesin Las Listrik	1



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026

-	Mesin Dynamo Kron	3
-	Mesin Penekuk Plat	1
-	Mesin Pembengkok Plat	3
-	Mesin Pemotong Plat	2
-	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain	6
-	Mesin Gerinda Tangan	1
-	Mesin Ampelas Tangan	9
-	Mesin Ampelas Rol Kecil	2
-	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain	6
-	Solder Listrik	17
-	Perkakas Bengkel Lain-lain	193
-	Mesin Spooling	1
-	Pengasah Lobang Stang Piston	1
-	Perkakas Bengkel Service Lain-lain	32
-	Auto Hoist	4
-	Perkakas Pengangkat Bermesin Lain-lain	2
-	Mesin Gergaji	4
-	Mesin Ketam	8
-	Mesin Penghalus	1
-	Perkakas Bengkel Kayu Lain-lain	9
-	Mesin Tenun Textil	3
-	Perkakas Bengkel Khusus Lain-lain	4
-	Peralatan Las Listrik	9
-	Peralatan Las Karbit	2
-	Peralatan Las Lain-lain	31



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026

-	Perkakas Bangku Kerja	1
-	Pisau Bergigi	4
-	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam Lain-lain	41
-	Armature Drying Oven	6
-	Perkakas Pengangkat Lain-lain	18
-	Tool Kit Set	31
-	Tool Kit Boks	56
-	Fuller Set	2
-	Perkakas Standar Lain-lain	67
-	Kunci Khusus Untuk Engine	7
-	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baud	27
-	Kunci Khusus Momen	2
-	Perkakas Khusus Lain-lain	11
-	Gergaji	49
-	Ketam	65
-	Bor	18
-	Pahat	68
-	Water Pas	14
-	Siku	10
-	Palu	59
-	Tang	70
-	Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain	117
-	Guting Plat	6
-	Gunting Plat Tangan	8
-	Tang Kombinasi	25



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026

-	Kikir, Segi Empat, Segi Tiga, Setengah Bulat, Bula	40
-	Kunci Pas Satu Set	34
-	Peralatan Tukang Besi Lain-lain	33
-	Boor Engkol	17
-	Peralatan Tukang Kayu Lain-lain	53
-	Meteran Kain	2
-	Trap Latihan	5
-	Volt Meter High Tenson	4
-	Signal Generator Audio VHF, UHF	7
-	Megger	2
-	CO Axial Attenuator	1
-	Frequency Counter	1
-	Alat Ukur Kepribadian Lain-lain	1
-	Alat Ukur/Test klinis Lain-lain	2
-	Alat Calibrasi Lain-lain	3
-	Videoscope With Side Band Adaptor	2
-	RF Bridge	1
-	Universal Tester Lain-lain	4
-	Loup	16
-	Micro Meter	27
-	Air Conditioning Unit	4
-	Compresor Unit	1
-	Avometer SU 20-20 K	47
-	Tool Set	3
-	Alat Ukur/Pembanding Lain-lain	10



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026

-	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	32
-	Timbangan	4
-	Takaran Bahan Bangunan 2 HL Berbentuk Tong	1
-	Takaran Latex Lain-lain	1
	Alat Pertanian	57
-	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain	15
-	Pompa Air	2
-	Mesin Penetas Telur	4
-	Oven	2
-	Alat Processing Lain-lain	4
-	Alat Produksi Perikanan Lain-lain	8
-	Kored	4
-	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	3
-	Alat Perontok Mesin (Power Thresher)	1
-	Honey (Penggulung Beras)	4
-	Rak-rak Penyimpanan	2
-	Lemari Penyimpanan	7
-	Alat Laboratorium Lain-lain	1
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.093
-	Lemari Besi	10
-	Rak Besi/Metal	10
-	Rak Kayu	3
-	Filling Besi/Metal	46



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026

	-	Band Kas	4
	-	Kardek Besi/Metal	1
	-	Lemari Kaca	4
	-	Lemari kayu	2
	-	Papan Visuil	3
	-	Perkakas Kantor	14
	-	Alat Penghancur Kertas	2
	-	Papan Nama Instansi	2
	-	Papan Tulis	1
	-	White Board	26
	-	Alat Penghancur Kertas Globe	2
	-	Mesin Absensi	1
	-	Overhead Projektor	1
	-	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	9
	-	Generator Set (Genset)	1
	-	Lemari Kayu	11
	-	Rak Kayu	5
	-	Meja Besi/Metal	2
	-	Meja Kayu/Rotan	23
	-	Kursi Besi/Metal	26
	-	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2
	-	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	10
	-	Meja Rapat	4
	-	Meja Podium	1
	-	Kursi Tamu	4



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026

-	Kursi Lipat	118
-	Meja Komputer	32
-	Tenda	1
-	Meja Biro	11
-	Sofa	4
-	MOUBILER LAINNYA	15
-	Mesin Penghisap Debu	2
-	Mesin Potong Rumput	3
-	Alat Pembersih Lain-lain	4
-	Lemari Es	1
-	AC Unit	3
-	AC Split	52
-	Kipas Angin	13
-	Alat Pendingin Lain-lain	1
-	Treng Air	2
-	Alat Dapur Lain-lain	18
-	Televisi	7
-	Amplifiler	2
-	Loudspeaker	2
-	Compact Disc	3
-	Wireless	5
-	Microphone	1
-	Unit Power Supply	5
-	Stabilisator	3
-	Mesin Jahit	19



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026

-	Aquarium	2
-	Seterika	2
-	Water Filter	1
-	Handy Cam	1
-	Alat Rumah Tangga Lain-lain	200
-	Gorden	2
-	Alat Pemadam Portable	3
-	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	5
-	Mainframe	1
-	Internet	1
-	P.C Unit	38
-	Laptop	22
-	Note Book	12
-	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1
-	CPU	5
-	Printer	27
-	Monitor	1
-	Printer	12
-	Scanner	3
-	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	6
-	UPS / Stabilizer	6
-	Fingerprint Scanner	5
-	Router	1
-	Peralatan Jaringan Lain-lain	1
-	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026

-	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4
-	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	16
-	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	63
-	Meja Tamu Ruangan Biasa	2
-	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
-	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5
-	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	13
-	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	58
-	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	14
-	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	1
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	86
-	Proyektor + Attachment	2
-	Audio Attenuator	1
-	Microphone/Wireless Mic	1
-	Microphone Floor Stand	1
-	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1
-	Digital Audio Storage System	1
-	Peralatan studio Visual Lain-lain	3
-	Peralatan studio Video dan film A Lain-lain	4
-	Mesin Cetak Listrik Elektronik	1
-	Mesin Cetak Offset Roll	1
-	Mesin Press	2
-	Mesin Jahit Benang	24



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026

-	Peralatan Cetak Lain-lain	10
-	Peralatan Computing Lain-lain	4
-	Rectifier	4
-	Kompas	16
-	Sound System	1
-	Pesawat Telephone	2
-	Facsimile	1
-	Alat Komunikasi Lain-lain	1
-	Alat komunikasi Radio UHF Lain-lain	1
-	Infocus	3
-	Switchwe Antena Lain-lain	1
Alat-alat Kedokteran		7
-	Tablet Machine	2
-	Video Camera dan Recorder	1
-	Termometer Merkuri untuk Suhu Badan	3
-	Alat Kesehatan Olah Raga Lain-Lain	1
Alat Laboratorium		15
-	TV Monitor	5
-	Presciion Filing Machine	6
-	Personal Komputer	1
-	Layar	1



	- Tachometer	2
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	1
	- Alat Keamanan Lain-lain	1



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi yang telah dilaksanakan, disajikan ke dalam tabel di bawah ini :



Tabel T-C.23.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sukabumi**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Tahun 2016 - 2021						Rasio Capaian Pada Tahun 2016 - 2021					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
RENSTRA LAMA																						
1	Rasio penduduk yang bekerja				93,64	93,75	93,84				93,55	94,88	92,23				99,90	101,21	98,3			
2	Pencari Kerja yang ditempatkan				54,67	55,77	56,88				53,60	57,86	78,18				98,04	103,75	137			
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				54,67	55,77	56,88				58,50	56,88	62,72				107,01	101,99	110			
4	Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional)				140,00	140,00	140,00				140,00	140,00	140,00				100,00	100,00	100			
5	Jumlah pelatihan berbasis kompetensi				100,00	100,00	100,00				100,00	240,00	140,00				100,00	240,00	140			
6	Jumlah pelatihan berbasis masyarakat				200,00	200,00	200,00				200,00	280,00	120,00				100,00	140,00	60			
7	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial				100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100			
8	Jumlah masyarakat Pedesaan dalam memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Institusional)				20,00	40,00	40,00				200,00	280,00	120,00				1000,00	700,00	300			
9	Jumlah KK transmigran yg diberangkatkan pada tahun berjalan				15,00	16,20	16,80				15,00	16,60	17,00				100,00	102,47	101			
10	Jumlah KK transmigran yang dibina				30,00	30,00	30,00				30,00	30,00	30,00				100,00	100,00	100			



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Tahun 2016 - 2021						Rasio Capaian Pada Tahun 2016 - 2021					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
RENSTRA BARU																						
1	Tingkat pengangguran terbuka							7-12	7-12	7-12				7,99	9,60					86	93	
2	Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi							100,00	100,00	100,00				100,00	100,00					100,00	100,00	
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja							65,00	65,00	67,00				62,68	61,56					96,43	94,71	
4	Presentase penyelesaian kasus hubungan industrial							100,00	100,00	100,00				100,00	100,00					100,00	100,00	
5	Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan							10,00	20,00	25,00				5,00	0,00					50,00	0,00	
6	Jumlah KK transmigran yang dibina							30,00	30,00	30,00				30,00	40					100,00	133,33	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026**

Tabel T-C.24.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sukabumi**

Uraian	Anggaran Pada Tahun 2016 - 2021						Realisasi Anggaran pada Tahun 2016 - 2021						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2016 - 2021						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	634.660.300	1.010.227.296	1.111.286.319	1.599.370.900	1.405.889.100	-	624.367.868	891.521.319	1.077.166.914	1.545.577.199	1.381.113.199	-	98,38	88,25	96,93	96,64	98,24	-	1.152.286.783	1.103.949.300
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.493.685.450	1.480.636.503	1.319.028.488	938.583.300	580.868.500	-	1.363.398.200	1.446.110.551	1.254.531.479	901.878.813	554.013.461	-	91,28	97,67	95,11	96,09	95,38	-	1.162.560.448	1.103.986.501
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	48.900.000	55.192.000	-	63.888.000	-	-	48.900.000	55.092.000	-	63.625.500	-	-	100,00	99,82	0,00	99,59	0,00	-	33.596.000	33.523.500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	61.800.000	44.100.000	50.000.000	15.000.000	-	-	46.787.500	43.650.000	49.834.600	14.500.000	-	-	75,71	98,98	99,67	96,67	0,00	-	34.180.000	30.954.420
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	189.097.825	722.254.833	556.264.761	174.950.000	37.319.000	-	182.532.000	677.635.133	496.660.500	173.808.000	37.319.000	-	96,53	93,82	89,28	99,35	100,00	-	335.977.284	313.590.927
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	2.813.163.500	1.235.000.000	1.039.012.000	911.983.200	1.860.977.400	-	720.113.000	1.184.027.650	929.498.233	888.692.200	1.839.928.870	-	25,60	95,87	89,46	97,45	98,87	-	1.572.027.220	1.112.451.991
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	75.000.000	1.619.411.000	982.711.200	1.483.234.600	212.066.000	-	65.708.500	1.553.880.015	960.691.400	1.449.359.981	210.291.000	-	87,61	95,95	97,76	97,72	99,16	-	874.484.560	847.986.179
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	618.200.000	-	294.517.000	862.000.000	582.325.000	-	459.263.000	-	237.838.000	835.413.000	414.887.000	-	74,29	0,00	80,76	96,92	71,25	-	471.408.400	389.480.200
Program Transmigrasi	506.514.000	402.840.000	301.906.950	336.360.000	80.871.000	-	264.230.850	313.699.000	260.832.950	333.140.100	80.871.000	-	52,17	77,87	86,40	99,04	100,00	-	325.698.390	250.554.780



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a) Tantangan

Dalam pelayanannya di bidang ketenagakerjaan banyak sekali tantangan baik di lingkungan internal maupun eksternal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lingkungan Eksternal yang dihadapi diantaranya ;

1. Semakin meningkatnya angka pengangguran karena kurangnya kompetensi para pencari kerja dan tidak sesuainya antara kesempatan kerja yang ada dengan kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja;
2. Sedikitnya tenaga kerja yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
3. Masih adanya perusahaan yang tidak paham akan aturan ketenagakerjaan;
4. Masih adanya tenaga kerja yang belum masuk dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. Masih kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha;
6. Masih banyaknya Tenaga Kerja Ilegal dan tidak mempunyai kompetensi;
7. Masih banyaknya kasus perselisihan ;
8. Masih banyaknya masyarakat yang tidak paham akan program transmigrasi ;



9. Produktifitas masyarakat transmigrasi lokal yang belum optimal.

Sedangkan permasalahan yang ada di lingkungan internal diantaranya :

1. Kurangnya Alokasi Anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada bidang – bidang teknis;
3. Jumlah dan kondisi peralatan untuk praktik pelatihan kerja/keterampilan masyarakat perlu ditingkatkan sesuai perkembangan;
4. Belum adanya sarana mobilitas pelayanan ketenagakerjaan;
5. Kurangnya tenaga pengantar kerja;
6. Kurangnya tenaga Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM);
7. Kurangnya tenaga Mediator Hubungan Industrial.

b) Peluang

Peluang yang ada pada lingkungan Eksternal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi :

1. Banyaknya Kesempatan Kerja bagi pekerja seiring banyaknya Investor yang masuk ke Wilayah Kabupaten Sukabumi;



2. Dengan adanya pelatihan kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi sehingga banyaknya tenaga kerja yang tersedia dan berkompeten;
3. Proyek Infrastruktur Strategis Nasional, seperti tol BOCIMI dan Double Track Kereta Api di Sukabumi, dapat membuka peluang kesempatan usaha bagi warga sekitar;
4. Potensi investasi pariwisata yang semakin berkembang dapat menjadi peluang bagi masyarakat sekitar untuk membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja disektor ekonomi kreatif;
5. Adanya system aplikasi SILENT CENTER (Sukabumi Integrated Labour and Employment Center) Pusat Ketenagakerjaan Sukabumi yang Terintegrasi, yang memudahkan masyarakat atau pencari kerja untuk mengikuti pelatihan kerja maupun melamar pekerjaan secara online.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian antara lain:

Permasalahan-permasalahan yang ada di Disnakertrans Kabupaten Sukabumi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, yaitu :

Masalah Ketenagakerjaan :

1. Masih rendahnya kualitas kompetensi dan produktivitas pencari kerja;
2. Belum optimalnya perluasan dan pengembangan kesempatan kerja;
3. Belum optimalnya pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan serta hubungan industrial;
4. Belum optimalnya transformasi tenaga kerja menjadi wirausaha mandiri;
5. Belum optimalnya integrasi data ketenagakerjaan;
6. Masih tingginya kesempatan yang sama antara tenaga kerja perempuan dan laki-laki.



Masalah Ketransmigrasian :

1. Keterbatasan kuota target pemberangkatan;
2. Terjadinya perubahan regulasi;
3. Rendahnya tingkat kompetensi masyarakat translok;
4. Tidak tersedianya petugas pendamping di setiap lokasi translok;
5. Kurangnya ketersediaan SDM fungsional dan keterbatasan anggaran.

Faktor yang mempengaruhi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi diantaranya adalah :

1. Masih terbatasnya perluasan kesempatan kerja;
2. Masih kurangnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan masyarakat;
3. Kurangnya tenaga fungsional pengantar kerja dan mediator.
4. Masih adanya perusahaan yang belum mentaati peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja;
5. Masih adanya perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja/buruh;
6. Banyaknya kesempatan bekerja ke luar negeri yang tidak bisa diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia akibat ketidak sesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kesempatan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja;
7. Kuota pemberangkatan transmigrasi ke luar pulau jawa yang masih ditentukan oleh pemerintah pusat;



8. Masih banyaknya transmigran yang pulang pergi (eksodan).

Faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan adalah :

1. Kurangnya arus masuk modal asing yang sifatnya padat karya;
2. Lemahnya iklim investasi dalam menghadapi pasar global;
3. Perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif bagi pengembangan usaha sehingga tidak mendukung penciptaan lapangan kerja baru;
4. Rendahnya tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja;
5. Tekanan upah bagi beberapa perusahaan yang belum stabil.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, yang terdiri dari faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong pelayanan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi dan merupakan input bagi perumusan isu-isu strategis. Indikator Makro Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sukabumi adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), indikator inilah yang harus dicapai Disnakertrans Kabupaten Sukabumi dalam 5 (lima)



tahun kedepan agar bisa Mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sukabumi sehingga Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir dan Batin.



**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Disnakertrans Kabupaten Sukabumi
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin					
No	Misi dan Prioritas Pembangunan KDH dan Wakil KDH terpilih		Permasalahan Pelayanan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2		3	4	5
1.	Misi : 1. Prioritas Pembangunan SDM	Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan	1. Masih rendahnya kualitas kompetensi dan produktivitas pencari kerja; 2. Belum optimalnya perluasan dan pengembangan kesempatan kerja; 3. Belum optimalnya pembinaan dan perlindungan	1. Semakin meningkatnya angka pengangguran karena kurangnya kompetensi para pencari kerja dan tidak sesuainya antara kesempatan kerja yang ada dengan	1. Banyaknya Kesempatan Kerja bagi pekerja seiring banyaknya Investor yang masuk ke Wilayah Kabupaten Sukabumi; 2. Dengan adanya pelatihan kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi sehingga banyaknya



			<p>ketenagakerjaan serta hubungan industrial;</p> <p>4. Belum optimalnya transformasi tenaga kerja menjadi wirausaha mandiri;</p> <p>5. Belum optimalnya integrasi data ketenagakerjaan;</p> <p>6. Masih tingginya kesempatan yang sama antara tenaga kerja perempuan dan laki-laki.</p>	<p>kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja;</p> <p>2. Sedikitnya tenaga kerja yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan;</p> <p>3. Masih adanya perusahaan yang tidak paham akan aturan ketenagakerjaan;</p> <p>4. Masih adanya tenaga kerja</p>	<p>tenaga kerja yang tersedia dan berkompeten;</p> <p>3. Proyek Infrastruktur Strategis Nasional, seperti tol BOCIMI dan Double Track Kereta Api di Sukabumi, dapat membuka peluang kesempatan usaha bagi warga sekitar;</p> <p>4. Potensi investasi pariwisata yang semakin berkembang dapat menjadi peluang bagi masyarakat sekitar untuk membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga</p>
--	--	--	--	--	--



				<p>yang belum masuk dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja;</p> <p>5. Masih kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha;</p> <p>6. Masih banyaknya Tenaga Kerja Ilegal dan tidak mempunyai kompetensi;</p> <p>7. Masih banyaknya kasus perselisihan ;</p> <p>8. Masih banyaknya masyarakat yang tidak paham akan</p>	<p>kerja disektor ekonomi kreatif;</p> <p>5. Adanya system aplikasi SILENT CENTER (Sukabumi Integrated Labour and Employment Center) Pusat Ketenagakerjaan Sukabumi yang Terintegrasi, yang memudahkan masyarakat atau pencari kerja untuk mengikuti pelatihan kerja maupun melamar pekerjaan secara online</p>
--	--	--	--	---	---



				program transmigrasi ; 9. Produktifitas masyarakat transmigrasi lokal yang belum optimal	
--	--	--	--	---	--



3.3. Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan R.I. dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi R.I. dan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat terhadap Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi ditujukan untuk sinkronisasi arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan dalam upaya pencapaian Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan dan pelayanan Bidang Ketransmigrasian.

I. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan RI					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Penghambat	Pendorong
meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan	Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi	1. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi 2. Meningkatkan produktivitas pekerja	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	1. Kualitas Angkatan kerja 2. Tantangan Peningkatan keahlian produktivitas tenaga kerja	1. Booming ekonomi digital dan automasi 2. Angkatan kerja muda (bonus demografi)



dunia industri di masa datang	pasar kerja fleksibel	<ul style="list-style-type: none">3. Meningkatkan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan5. Melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja6. Meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan7. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja8. Menyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) yang		3. Tantangan ketenagakerjaan Indonesia terkait pandemi covid-19	3. Perubahan kebutuhan keterampilan dan model pembelajaran
-------------------------------	-----------------------	---	--	---	--



		sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja			
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Penghambat	Pendorong
Menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan pasar kerja	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas pencari kerja	1. Meningkatkan daya saing tenaga kerja 2. Meningkatkan sarana dan prasana pelatihan kerja 3. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta keterampilan pekerja mandiri muda	1. Memberikan fasilitasi bagi peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan pekerja mandiri yang berdaya saing dan inovatif 2. Memberikan fasilitasi	1. Kualitas tenaga kerja masih rendah 2. Produktivitas tenaga kerja masih rendah	Peningkatan daya saing tenaga kerja



			<p>peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja</p> <p>3. Memberikan fasilitas bagi pencari kerja usia muda untuk meningkatkan kemampuan menjadi pekerja mandiri</p>		
<i>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi</i>					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Penghambat	Pendorong
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius	Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan kualitas pengembangan dan penempatan tenaga kerja	1. Meningkatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan standar kebutuhan	Belum optimalnya sarana prasarana dan kurikulum balai latihan kerja	Belum optimalnya sarana prasarana dan kurikulum balai latihan kerja



			<p>ketenagakerjaan melalui pelatihan institusional maupun non institusional</p> <p>2. Menjalin kerjasama dengan stakeholder ketenagakerjaan dalam rangka penempatan tenaga kerja baik didalam maupun diluar negeri</p>		
--	--	--	--	--	--



II. Penempatan Tenaga Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan RI					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Penghambat	Pendorong
meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja	Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel	1. Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan di dalam negeri 2. Meningkatkan perlindungan dalam penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri 3. meningkatkan tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	1. Tantangan penempatan dan perluasan kesempatan kerja 2. Kewirausahaan yang rendah 3. Tantangan ketenagakerjaan Indonesia terkait pandemi covid-19	1. Potensi pariwisata 2. Potensi ekonomi kreatif 3. Potensi agribisnis



		<p>4. meningkatkan jumlah wirausaha baru melalui inkubasi bisnis</p> <p>5. melaksanakan pengendalian tenaga kerja asing (TKA) melalui pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel</p>			
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Penghambat	Pendorong
Menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan pasar	Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang bekerja	<p>1. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi purna tenaga kerja</p> <p>2. Menciptakan serapan tenaga kerja melalui</p>	<p>1. Mengembangkan kemampuan purna tenaga kerja untuk mengembangkan kemampuan</p>	<p>1. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata</p> <p>2. Tingginya tingkat pengangguran terbuka usia muda</p>	<p>1. Pendukung penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat disabilitas</p> <p>2. Peningkatan penyerapan</p>



kerja		sector primer, sekunder dan tersier 3. Memperluas kesempatan kerja	sebagai pekerja mandiri 2. Memberikan fasilitasi penempatan tenaga kerja (baik di dalam negeri maupun di luar negeri) dan pembinaan purna-kerja 3. Memberikan fasilitasi perluasan kesempatan kerja	dengan pendidikan SMA ke bawah 3. Rendahnya akses terhadap lapangan kerja 4. Minat untuk berwirausaha setelah bekerja rendah 5. Fasilitasi purna tenaga kerja terbatas	tenaga kerja pada sector pertanian, industri, perdagangan dan jasa melalui penciptaan 2 juta serapan tenaga kerja baru dan mendukung penciptaan 100.000 wirausaha baru di Jawa Barat 3. Perluasan kesempatan kerja, peningkatan pelayanan kesempatan kerja dan pelayanan
-------	--	---	---	---	---



					informasi bursa kerja
<i>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi</i>					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Penghambat	Pendorong
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius	Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Memperluas kesempatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Silent Center dalam rangka peningkatan kesempatan kerja 2. Memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja laki-laki 3. Meningkatkan kesempatan kerja pada sektor unggulan pertanian dan pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya penganggur dan setengah penganggur di pedesaan 2. Kurangnya SDM dibidang teknis ketenagakerjaan 3. Masih banyaknya tingkat pengangguran terbuka 4. Kurangnya pemahaman calon PMI terhadap aturan yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka lapangan kerja dan kewirausahaan 2. Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait (BKPSDM) dan kementerian tenaga kerja RI 3. Perusahaan harus memprioritaskan masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk



			<ul style="list-style-type: none">4. Membuka kesempatan bekerja di dalam dan luar negeri5. Mengoptimalkan peranan stakeholder ketenagakerjaan dalam memperluas kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none">5. Belum semua PMI terdaftar di Disnakertrans Kab. Sukabumi	<ul style="list-style-type: none">mempkerjakan diperusahaannya4. Dipahaminya aturan penempatan PMI5. PMI terdaftar di Disnakertrans
--	--	--	--	---	---



III. Hubungan Industrial

Kementerian Ketenagakerjaan RI					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Penghambat	Pendorong
mewujudkan hubungan industrial dan dialog social ketenagakeijaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif	Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel	1. meningkatkan kuantitas/kualitas kelembagaan hubungan industrial 2. meningkatkan penerapan kebijakan tentang pengupahan serta struktur dan skala upah 3. meningkatkan efektifitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1. Tantangan hubungan industrial 2. Rancangan undang undang tentang cipta kerja dan peraturan pelaksanaannya serta penyempurnaan peraturan ketanagakerjaan 3. Tantangan ketenagakerjaan Indonesia terkait pandemi covid-19	



		<p>hubungan industrial</p> <p>4. meningkatkan perlindungan hak bagi pekeija/buruh dan pengusaha melalui pengaturan syarat kerja</p> <p>5. meningkatkan program, manfaat, dan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan</p>			
--	--	--	--	--	--



<i>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat</i>					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Penghambat	Pendorong
Menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan pasar kerja	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan iklim ketenagakerjaan baik	1. Membina sarana hubungan industrial 2. Meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh	1. Menyelesaikan kasus hubungan industrial secara cepat, tepat dan berkeadilan 2. Meningkatkan peran pekerja dan pengusaha dalam mewujudkan kelangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja 3. Memberikan fasilitasi	1. Hubungan Industrial belum kondusif 2. Kesejahteraan pekerja/buruh masih rendah 3.	1. Membina sarana hubungan industrial 2. Meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026

			kepada pekerja/buruh dalam rangka mencapai kesejahteraan		
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Penghambat	Pendorong
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius	Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan 2. Peningkatan pemahaman aturan ketenagakerjaan	1. Meningkatkan Perlindungan dan pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 2. Pembinaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	1. Kurangnya pemahaman peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja 2. Kurangnya Mediator 3. Permasalahan antara perusahaan dengan pekerja/buruh	1. Dipahaminya peraturan ketenagakerjaan disetiap perusahaan dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama setiap perusahaan mendaftarkan Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama 2. Bertambahnya jumlah Mediator



				4. Kepesertaan jamsostek diperusahaan	3. Meningkatnya kesejahteraan pekerja/buruh 4. Meningkatnya kepesertaan jamsostek
--	--	--	--	---------------------------------------	--

IV. Transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Penghambat	Pendorong
1. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah 2. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan	1. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi 2. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta	1. Penguatan pembangunan desa, perdesaan dan transmigrasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional	1. Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan berwawasan lingkungan 2. Peningkatan dan pemanfaatan modal social budaya untuk	1. Tumpang tindih regulasi yang potensial menimbulkan konflik kelembagaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdesaan, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi 2. Besarnya potensi bencana, baik bencana alam maupun bencana non	Tersedianya Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) yang telah ditetapkan menjadi Kawasan transmigrasi serta Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang potensial



dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi 3. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi	data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi 3. Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi	khususnya program <i>food estate</i> 2. Perlibatan pelaku seni dan budaya untuk mendukung pengembangan produk unggulan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)	pembangunan perdesaan. (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)	alam seperti bencana nasional pandemi Covid-19 3. Besarnya potensi konflik pertanahan yang berpengaruh cukup besar dalam upaya pembangunan berbasis kewilayahan	dikembangkan menjadi instrumen mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antara perdesaan dan perkotaan
--	---	---	---	--	--



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Penghambat	Pendorong
Mewujudkan transmigran yang inovatif dan sejahtera	Terwujudnya Kerjasama Antar Daerah (KSAD) bidang ketransmigrasian yang saling menguntungkan	1. Mendukung terhadap terwujudnya Kerjasama antar daerah bidang ketransmigrasian melalui forum KIE transmigrasi 2. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat transmigrasi	1. Mendorong penyelenggara n Kerjasama antar daerah pengirim dengan daerah penempatan 2. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat transmigrasi melalui pelatihan yang efektif	1. Alokasi target penempatan calon transmigran terbatas 2. Ketidaksesuaian antara keterampilan calon transmigran dengan kebutuhan daerah penempatan 3. Manajemen penyelenggaraan transmigrasi dalam bentuk Kerjasama Antar Daerah sulit diimplementasikan 4. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan masyarakat transmigrasi lokal (resettlement) dalam menumbuhkembangkan jiwa wirausaha	1. Pendukungan terhadap terwujudnya kerjasama antardaerah bidang ketransmigrasian melalui forum KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Transmigrasi 2. Peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat transmigrasi



<i>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi</i>					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Penghambat	Pendorong
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius	Meningkatnya jumlah Transmigran yang terfasilitasi	1. Pembinaan Sosial Ekonomi masyarakat transmigrasi lokal 2. Pengiriman transmigran ke Luar Pulau Jawa 3. Fasilitasi Penanaman konflik masyarakat transmigrasi di Luar Pulau Jawa	1. Meningkatkan Pembinaan masyarakat transmigrasi lokal 2. Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 3. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan	1. Tidak adanya pelatihan untuk jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 2. Fasilitas umum yang ada di lokasi transmigrasi lokal belum memadai, masih membutuhkan rehabilitasi dan pembangunan 3. Masih kurangnya lokasi transmigrasi untuk menampung calon transmigran 4. Target penempatan tidak sesuai dengan yang diharapkan	1. Meningkatnya animo masyarakat untuk ikut bertransmigrasi 2. Adanya dukungan anggaran 3. Tersedianya lahan untuk pembangunan lokasi transmigrasi 4. Sedikitnya kuota pemberangkatan transmigran ke luar Pulau Jawa



			transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 4. Fasilitasi dan klarifikasi penanganan konflik transmigrasi di Luar Pulau Jawa	5. Transmigran kurang memiliki keterampilan yang sesuai dengan potensi daerah penerima 6. Masih ada transmigran yang kurang berhasil dan kembali ke daerah asal diakibatkan sikap mental ,kondisi lokasi	5. Produktivitas untuk peningkatan pendapatan masyarakat transmigrasi lokal 6. Kurangnya koordinasi pasca penempatan transmigran
--	--	--	---	---	---



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses untuk menelaah suatu dampak kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap lingkungan ataupun sebaliknya. KLHS dimaksudkan untuk menyelenggarakan analisis secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi serta menjamin program/arahan kebijakan di Kabupaten Sukabumi telah memperhatikan keutuhan dan keselamatan lingkungan hidup. Muatan KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 terfokus pada 5 (lima) TPB prioritas sebagai berikut :

1. TPB 1 : Tanpa Kemiskinan
2. TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
3. TPB 10 : Berkurangnya Kesenjangan
4. TPB 11 : Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan
5. TPB 15 : Ekosistem Darat

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi berkontribusi terhadap TPB 1 dan TPB 10 untuk mencapai outcome yang telah ditentukan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi. Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 1 tanpa kemiskinan, disajikan ke dalam tabel dibawah :



Tabel 3.4.

Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 1
tanpa kemiskinan

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Para Pihak
Menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pengentasan kemiskinan akibat adanya pandemic	Program perencanaan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	
		Program penempatan tenaga kerja	

Tabel 3.5.

Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 10
berkurangnya kesenjangan

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Para Pihak
Berkurangnya kesenjangan dengan peningkatan ekonomi masyarakat	Pengentasan kemiskinan akibat adanya pandemic	Program perencanaan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	
		Program penempatan tenaga kerja	

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 Ayat (2) dimana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak maka peran pemerintah daerah perlu hadir didalamnya. Tercatat hingga Tahun 2020 di Kabupaten Sukabumi terdapat 2.618.381 jiwa yang merupakan Penduduk Kabupaten Sukabumi, 1.146.833 merupakan Angkatan Kerja, 715.978 Bukan Angkatan Kerja dan



1.862.811 merupakan Penduduk Usia Kerja, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 61.56% dan Tingkat Pengangguran Terbuka 9,60%. Pencari Kerja yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekitar 17.549 dan Pencari Kerja yang telah ditempatkan sekitar 4.464, sementara penempatan pencari kerja di Tahun 2020 sangat sedikit dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yaitu 10.023 pencari kerja yang telah ditempatkan, hal ini terjadi dikarenakan banyak perusahaan yang tutup akibat Pandemi Covid-19 yang belum selesai sampai saat ini dan terdapat tenaga kerja yang masih memiliki keterampilan yang rendah di setiap sector lapangan usaha, sehingga berakibat pada rendahnya produktivitas lapangan usaha tersebut., sementara jumlah Tenaga Kerja yang di rumahkan atau di PHK sd Triwuan III Tahun 2020 di angka +/- 11.000 orang.

Secara makroekonomi, pengangguran yang ada merupakan suatu permasalahan yang perlu dijaga agar laju dan tingkat hal tersebut berada dalam batas aman. Tenaga kerja yang terampil pada zaman ini lebih ditekankan guna menghadapi perkembangan industri 4.0 dan memutus lingkaran kemiskinan (vicious circle of poverty). Program unggulan dalam rangka peningkatan serapan tenaga kerja adalah Link and Match antara pencari kerja dan penyedia lapangan Kerja dengan optimalisasi BLK dan pelatihan bekerja berbasis masyarakat

Pelayanan Bidang ketenagakerjaan harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi dan sarana prasarana yang memadai dengan pelayanan pelatihan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan lembaga pendidikan keterampilan yang tersedia di wilayah



Kabupaten Sukabumi telah memberikan peningkatan pendidikan bagi lembaga pendidikan keterampilan tersebut untuk meningkatkan kualitas dari lembaga itu sendiri. Dalam Mengatasi pengangguran dan setengah pengangguran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, serta Program Penempatan Tenaga Kerja.

Dari analisis uraian diatas dirumuskan isu-isu strategis dalam pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas kompetensi dan produktivitas pencari kerja;
2. Belum optimalnya perluasan dan pengembangan kesempatan kerja;
3. Belum optimalnya pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan serta hubungan industrial;
4. Belum optimalnya transformasi tenaga kerja menjadi wirausaha mandiri;
5. Belum optimalnya integrasi data ketenagakerjaan;
6. Masih tingginya kesempatan yang sama antara tenaga kerja perempuan dan laki-laki;
7. Keterbatasan kuota target pemberangkatan;
8. Terjadinya perubahan regulasi;
9. Rendahnya tingkat kompetensi masyarakat translok;
10. Tidak tersedianya petugas pendamping di setiap lokasi translok;
11. Kurangnya ketersediaan SDM fungsional dan keterbatasan anggaran.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Sukabumi. Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam jangka menengah yaitu, ***"Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius "***.

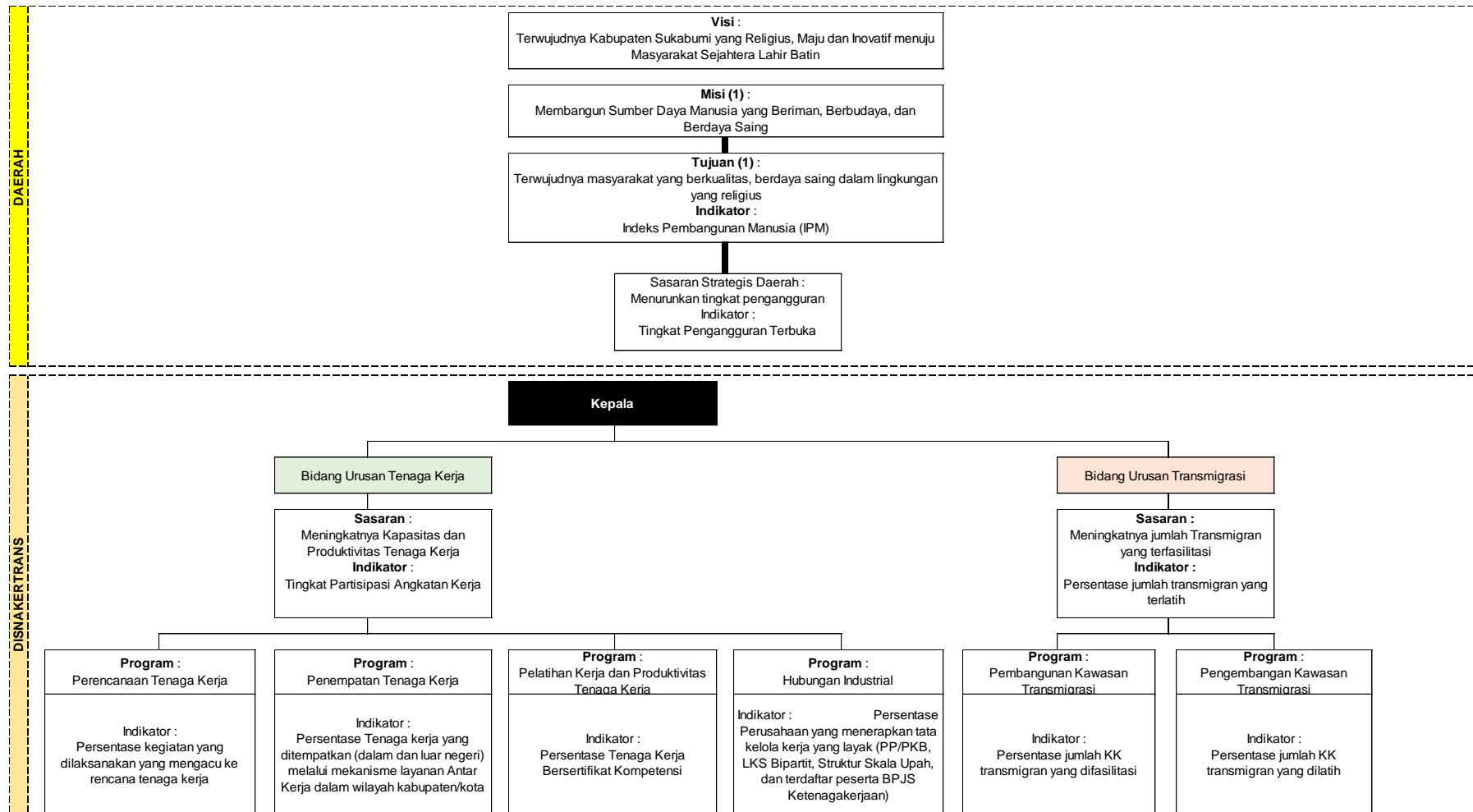
Sasaran adalah hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam upaya pencapaian tujuan maka ditentukan indikator sasaran yang ingin dicapai adalah Tingkat Pengangguran Terbuka

Keterkaitan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, dapat digambar sebagai berikut :



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026





Adapun keterkaitan Tujuan dan Sasaran dengan Indikator Kinerja jangka menengah Disnakertrans sebagaimana tertuang dalam matrik sebagai berikut :



Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN 2021 - 2026					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius	Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	55-70	55-70	55-70	55-70	55-70	55-70
		Meningkatnya jumlah Transmigran yang terfasilitasi	Persentase jumlah transmigran yang terlatih	16,6	16,6	20	20,4	21,2	21,8



Dari matrik tujuan, dan sasaran jangka menengah tersebut, yang menjadi indikator kinerja utama Disnakertrans Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

**Tabel Indikator Kinerja Utama
Disnakertrans Kabupaten Sukabumi**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk 15thn keatas}} \times 100$	Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
2	Meningkatnya jumlah Transmigran yang terfasilitasi	Persentase jumlah transmigran yang terlatih	$\frac{\text{Jumlah KK Transmigran yang terlatih}}{\text{Jumlah KK Transmigran}} \times 100$	Bidang Transmigrasi



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Dokumen RPJMD. Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program, dan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Startegi dan kebijakan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin			
MISI : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya, dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius	Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan kualitas pengembangan dan penempatan tenaga kerja	Meningkatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan standar kebutuhan ketenagakerjaan melalui pelatihan institusional maupun non institusional Menjalin kerjasama dengan stakeholder ketenagakerjaan dalam rangka penempatan tenaga kerja baik didalam maupun diluar negeri
		Memperluas kesempatan kerja	Optimalisasi Silent Center dalam rangka peningkatan kesempatan kerja
			Memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja laki-laki
			Meningkatkan kesempatan kerja pada sektor unggulan pertanian dan pariwisata
			Membuka kesempatan bekerja di dalam dan luar negeri
			Mengoptimalkan peranan stakholder ketenagakerjaan dalam memperluas kesempatan kerja
		Perbaiki iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan	Meningkatkan Perlindungan dan pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
		Peningkatan pemahaman aturan ketenagakerjaan	Pembinaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	Meningkatnya jumlah Transmigran yang terfasilitasi	Pembinaan Sosial Ekonomi masyarakat transmigrasi lokal	Meningkatkan Pembinaan masyarakat transmigrasi lokal
		Pengiriman transmigran ke Luar Pulau Jawa	Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
		Fasilitasi Penanganan konflik masyarakat transmigrasi di Luar Pulau Jawa	Pengarahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Fasilitasi dan klarifikasi penanganan konflik transmigrasi di Luar Pulau Jawa



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Disnakertrans Kabupaten Sukabumi seperti :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja (Janji Politik 100 Hari Kerja)
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang bertujuan untuk :
 - a. Pemulihan Ekonomi Daerah
 - b. Janji Politik Sinergi dengan Dekranasda
 - c. Janji Politik Sinergi dengan CPUGGp (Ciletuh Palabuhanratu Unesco Global Geopark)
3. Program Penempatan Tenaga Kerja yang bertujuan untuk :
 - a. Pemulihan Ekonomi Daerah
 - b. Janji Politik SILENT CENTER (Sukabumi Integrated Labour and Employment CENTER)
 - c. Janji Politik Life Skill

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Disnakertrans untuk urusan ketenagakerjaan dan urusan transmigrasi dari tahun 2021-2026 sebagai berikut :



Tabel T-C.27.

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sukabumi**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
							18.495		43.514		29.181		32.526		32.151		32.747		170.119			
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius		2	07	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %	144	100 %	46	100 %	180	100 %	145	100 %	180	100 %	145	100 %	696	
							Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %	10.990	100 %	10.038	100 %	10.095	100 %	10.130	100 %	10.130	100 %	10.130	100 %	50.523	
							Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %	-	100 %	-	100 %	21	100 %	160	100 %	100	100 %	160	100 %	441	
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100 %	57	100 %	35	100 %	150	100 %	316	100 %	281	100 %	262	100 %	1.044	
							Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100 %	557	100 %	530	100 %	520	100 %	960	100 %	960	100 %	960	100 %	3.930	
							Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %	250	100 %	15.200	100 %	185	100 %	2.140	100 %	1.990	100 %	1.990	100 %	21.505	
							Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100 %	1.082	100 %	1.250	100 %	1.340	100 %	1.350	100 %	1.400	100 %	1.450	100 %	6.790	
							Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	509	100 %	550	100 %	675	100 %	860	100 %	810	100 %	860	100 %	3.755	
		2	07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	9 Dokumen	144	9 Dokumen	46	9 Dokumen	180	9 Dokumen	145	9 Dokumen	180	10 Dokumen	145	46 Dokumen	696	
		2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (renstra, renja, renja perubahan)	3 Dokumen	35	2 Dokumen	10								2 Dokumen	10	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	30	2 Dokumen	30	2 Dokumen	30	3 Dokumen	30	9 Dokumen	120	
		2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan	1 Dokumen	10	1 Dokumen	3								1 Dokumen	3	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	4 Dokumen	40	
		2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Perubahan	1 Dokumen	10	1 Dokumen	3								1 Dokumen	3	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)							
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	4 Dokumen	40				
		2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan	1 Dokumen	13	1 Dokumen	5									1 Dokumen	5			
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	4 Dokumen	60				
		2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Perubahan	1 Dokumen	13	1 Dokumen	5									1 Dokumen	5			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	4 Dokumen	60				
		2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	1 Dokumen	28	1 Dokumen	10									1 Dokumen	10			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	60	1 Laporan	25	1 Laporan	60	1 Laporan	25	4 Laporan	170				
		2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi	2 Dokumen	35	2 Dokumen	10									2 Dokumen	10			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	40	2 Laporan	40	2 Laporan	40	2 Laporan	40	2 Laporan	40	8 Laporan	160		
		2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	10.990	43 Dokumen	10.038	84 Dokumen	10.095	82 Dokumen	10.130	81 Dokumen	10.130	81 Dokumen	10.130	371 Dokumen	50.523			
		2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS	14 Bulan	10.900	14 Bulan	10.000									14 Bulan	10.000			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					55 Orang/Bulan	10.000	53 Orang/Bulan	10.000	52 Orang/Bulan	10.000	52 Orang/Bulan	10.000	212 Orang/Bulan	40.000				
		2	07	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi	12 Laporan	27	12 Laporan	10									12 Laporan	10			
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					12 Dokumen	30	12 Dokumen	50	12 Dokumen	50	12 Dokumen	50	48 Dokumen	180				
		2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	12	1 Laporan	5									1 Laporan	5			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	10	1 Laporan	10	1 Laporan	10	1 Laporan	10	4 Laporan	40				
2	07	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	10	1 Dokumen	3									1 Dokumen	3					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi									
									2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
									Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)					
								Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	4 Dokumen	40							
		2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	14	Laporan	31	14	Laporan	15							14	Laporan	15						
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					14	Laporan	35	14	Laporan	50	14	Laporan	50	14	Laporan	50	56	Laporan	185		
		2	07	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	10	1	Laporan	5							1	Laporan	5						
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	4 Dokumen	40							
		2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	15	Dokumen	21	22	Dokumen	160	19	Dokumen	100	22	Dokumen	160	78	Dokumen	441
		2	07	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen BMD Peralatan dan Mesin	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-								-	Dokumen	-					
								Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					-	Dokumen	-	1	Dokumen	15	1	Dokumen	15	1	Dokumen	15	3	Dokumen	45		
		2	07	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Aset	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-								-	Dokumen	-					
								Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					-	Dokumen	-	1	Dokumen	15	1	Dokumen	15	1	Dokumen	15	3	Dokumen	45		
		2	07	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen BMD yang akan di hapus/lelang	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-								-	Dokumen	-					
								Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					-	Laporan	-	3	Laporan	60	-	Laporan	-	3	Laporan	60	6	Laporan	120		
		2	07	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen BMD yang masih dapat di pergunakan	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-									-	Dokumen	-				
								Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					-	Laporan	-	2	Laporan	30	2	Laporan	30	2	Laporan	30	6	Laporan	90		
		2	07	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-									-	Dokumen	-				
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					12	Laporan	11	12	Laporan	25	12	Laporan	25	12	Laporan	25	48	Laporan	86				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		2	07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen BMD Yang dapat dipergunakan dan aset yang dalam keadaan Rusak Berat	- Dokumen	-	- Dokumen	-									- Dokumen	-	SEKRETARIAT	
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					3 Laporan	10	3 Laporan	15	3 Laporan	15	3 Laporan	15	12 Laporan	55		
		2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	90 Orang	57	90 Orang	35	55 Orang	150	53 Orang	316	52 Orang	281	52 Orang	262	302 Orang	1.044		
		2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	90 Stel	57	- Stel	-								- Stel	-			
								Jumlah pakaian khusus yang dibeli	- Stel	-	- Stel	-								- Stel	-			
								Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	- Stel	-	- Stel	-								- Stel	-			
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					7 Paket	150	4 Paket	188	4 Paket	188	3 Paket	164	18 Paket	690		
		2	07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya Dokumen Kepegawaian	- Dokumen	-	- Dokumen	-								- Dokumen	-			
								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					- Dokumen	-	2 Dokumen	15	2 Dokumen	15	2 Dokumen	15	6 Dokumen	45		
		2	07	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terpenuhinya kegiatan rapat koordinasi	- Bulan	-	- Bulan	-								- Bulan	-			
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					- Dokumen	-	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	3 Dokumen	30		
		2	07	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan	- Laporan	-	- Laporan	-								- Laporan	-			
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					- Dokumen	-	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	3 Dokumen	30		
		2	07	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun	- Orang	-	7 Orang	35								7 Orang	35			
								Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan					- Orang	-	10 Orang	50	3 Orang	15	4 Orang	20	17 Orang	85		
		2	07	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pegawai yang meninggal dunia	- Orang	-	- Orang	-								- Orang	-			
								Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas					- Laporan	-	2 Laporan	10	2 Laporan	10	2 Laporan	10	6 Laporan	30		
		2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta training soft skill	- Orang	-	- Orang	-								- Orang	-			
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					- Orang	-	9 Orang	6	9 Orang	6	9 Orang	6	27 Orang	18				
2	07	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	- Orang	-	- Orang	-								- Orang	-					
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					- Orang	-	60 Orang	12	60 Orang	12	60 Orang	12	180 Orang	36				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
		2	07	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimtek implementasi perundang-undangan	- Orang	-	- Orang	-								- Orang	-			
								Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				- Orang	-	15 Orang	15	15 Orang	15	15 Orang	15	45 Orang	45			
		2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran yang dipenuhi	12 Bulan	557	12 Bulan	530	12 Bulan	520	12 Bulan	960	12 Bulan	960	12 Bulan	960	60 Unit			3.930
		2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen yang dibeli	- Unit	-	- Unit	-								- Unit	-			
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				- Paket	-	1 Paket	50	1 Paket	50	1 Paket	50	3 Paket	150			
		2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	57	12 Bulan	30								12 Bulan	30			
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	30	4 Paket	30	4 Paket	30	4 Paket	30	16 Paket	120			
		2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang dibeli	100 Jenis	120	100 Jenis	120								100 Jenis	120			
								Jumlah Makan dan minum yang dibeli	12 Bulan	80	12 Bulan	80								12 Bulan	80			
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	130	3 Paket	200	3 Paket	200	3 Paket	200	12 Paket	730			
		2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fasilitasi barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	150	12 Bulan	150								12 Bulan	150			
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	110	4 Paket	200	4 Paket	200	4 Paket	200	16 Paket	710			
		2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya kegiatan rapat koordinasi	12 Bulan	150	12 Bulan	150								12 Bulan	150			
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	250	24 Laporan	400	24 Laporan	400	24 Laporan	400	96 Laporan	1.450			
		2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip/Dokumen yang di tata	- Dokumen	-	- Dokumen	-								- Dokumen	-			
								Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				- Dokumen	-	1 Dokumen	20	1 Dokumen	20	1 Dokumen	20	3 Dokumen	60			
		2	07	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi yang mendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	- Unit	-	- Unit	-								- Unit	-			
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				- Dokumen	-	2 Dokumen	60	2 Dokumen	60	2 Dokumen	60	6 Dokumen	180					
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan yang dibeli	24 Unit	250	21 Unit	15.200	22 Unit	185	124 Unit	2.140	109 Unit	1.990	109 Unit	1.990	385 Unit	21.505				
2	07	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dibeli	- Unit	-	- Unit	-								- Unit	-					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
									2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
								Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					- Unit	-	2 Unit	750	2 Unit	750	2 Unit	750	6 Unit	2.250			
		2	07	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli (R2 dan R4)	Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan yang dibeli (R2 dan R4)	- Unit	-	- Unit	-									- Unit	-			
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					- Unit	-	7 Unit	840	7 Unit	840	7 Unit	840	21 Unit	2.520			
		2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli	- Unit	-	- Unit	-									- Unit	-			
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					- Unit	-	80 Unit	200	80 Unit	200	80 Unit	200	240 Unit	600			
		2	07	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Task Berwujud yang dibeli	- Unit	-	- Unit	-									- Unit	-			
								Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan					2 Unit	50	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	2 Unit	50			
		2	07	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dibangun (Kantor Dinas dan RI KI)	- Unit	-	1 Unit	15.000										1 Unit			15.000
								Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-			
		2	07	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	24 Unit	250	20 Unit	200										20 Unit			200
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					20 Unit	135	20 Unit	200	20 Unit	200	20 Unit	200	80 Unit	735			
		2	07	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	- Unit	-	- Unit	-										- Unit			-
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					- Unit	-	15 Unit	150	- Unit	-	- Unit	-	15 Unit	150			
		2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa langganan kebutuhan perkantoran yang dipenuhi	8 Jenis	1.082	8 Jenis	1.250	25 Laporan	1.340	25 Laporan	1.350	25 Laporan	1.400	25 Laporan	1.450	108 Laporan	6.790			
		2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	162	12 Bulan	250										12 Bulan			250
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	250	12 Laporan	250	12 Laporan	250	12 Laporan	250	48 Laporan	1.000					
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Keamanan Kantor, Jasa Kebersihan Kantor, Jasa Tenaga Supir dan Non PNS (Bulan)	13 Bulan	920	13 Bulan	1.000										13 Bulan	1.000				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					13 Laporan	1.090	13 Laporan	1.100	13 Laporan	1.150	13 Laporan	1.200	52 Laporan	4.540					
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	36 Unit	509	36 Unit	550	84 Unit	675	89 Unit	860	87 Unit	810	89 Unit	860	385 Unit	3.755					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	6 Unit	292	6 Unit	300							6 Unit	300			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					6 Unit	300	6 Unit	300	6 Unit	300	24 Unit	1.200				
		2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan yang dipelihara	30 Unit	217	30 Unit	250							30 Unit	250			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					29 Unit	250	29 Unit	250	29 Unit	250	116 Unit	1.000				
		2	07	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara	- Unit	-	- Unit	-							- Unit	-			
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara					- Unit	-	2 Unit	50	- Unit	-	2 Unit	50	4 Unit			100
		2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	- Unit	-	- Unit	-							- Unit	-			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					4 Unit	80	7 Unit	200	7 Unit	200	7 Unit	200	25 Unit			680
		2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Unit	-	- Unit	-	45 Unit	45	45 Unit	60	45 Unit	60	45 Unit	60			180 Unit
	Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	90 %	500	92 %	160	94 %	160	96 %	160	98 %	160	100 %	160	100 %	800	
		2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	2 Dokumen	500	1 Dokumen	160	2 Dokumen	160	2 Dokumen	160	2 Dokumen	160	2 Dokumen	160	9 Dokumen	800	
		2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	- Dokumen	-	- Dokumen	80	1 Dokumen	90	1 Dokumen	80	1 Dokumen	75	1 Dokumen	75	4 Dokumen	400	
		2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro	1 Dokumen	200	1 Dokumen	80								1 Dokumen	80		
							Pembangunan Aplikasi SILENT CENTER		1 Unit	300	- Unit	-								- Unit	-		
							Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro						10 Perusahaan	70	13 Perusahaan	80	15 Perusahaan	85	18 Perusahaan	85	56 Perusahaan	320	
		2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2,1 %	850	2,3 %	7.180	2,5 %	7.500	2,7 %	7.750	2,9 %	7.785	3 %	7.925	3 %	38.140	
		2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pelatihan yang Berkompeten	560 Orang	550	460 Orang	5100	560 Orang	6.940	560 Orang	7.090	560 Orang	7.040	560 Orang	7.065	2700 Orang	33.235	
		2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster kompetensi	Jumlah Peserta Bidang Keahlian Certified Computer Profesional Office Administrator (CCPOA) Instiusional	- Orang	-	32 Orang	300								32 Orang	300		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
									2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
								Jumlah Peserta Bidang Keahlian Certified Computer Profesional Office Administrator (CCPOA) Non Institutional	- Orang		16 Orang	150									16 Orang	150		
								Jumlah Peserta Bidang Keahlian Furniture Institutional	- Orang		32 Orang	300									32 Orang	300		
								Jumlah Peserta Bidang Keahlian Furniture Non Institutional	- Orang		16 Orang	150									16 Orang	150		
								Jumlah Peserta Bidang Keahlian Instalasi Penerangan Institutional	16 Orang	110	32 Orang	300									32 Orang	300		
								Jumlah Peserta Bidang Keahlian Instalasi Penerangan Non Institutional	- Orang		16 Orang	150									16 Orang	150		
								Jumlah Peserta Bidang Keahlian Las Industri Shield Metal Arc Welding (SMAW) Institutional	16 Orang	110	16 Orang	150									16 Orang	150		
								Jumlah Peserta Bidang Keahlian Las Industri Shield Metal Arc Welding (SMAW) Non Institutional	- Orang		16 Orang	150									16 Orang	150		
								Jumlah Peserta Bidang Keahlian Membatik Non Institutional	- Orang		32 Orang	300									32 Orang	300		
								Jumlah Peserta Bidang Keahlian Menjahit Institutional	16 Orang	110	16 Orang	150									16 Orang	150		
								Jumlah Peserta Bidang Keahlian Menjahit Non Institutional	- Orang		16 Orang	150									16 Orang	150		
								Jumlah Peserta Bidang Keahlian Perakitan Komputer Institutional	16 Orang	110	16 Orang	150									16 Orang	150		
								Jumlah Peserta Bidang Keahlian Perakitan Komputer Non Institutional	- Orang		16 Orang	150									16 Orang	150		
								Jumlah Peserta Bidang Keahlian Teknik Manufaktur Institutional	16 Orang	110	32 Orang	300									32 Orang	300		
								Jumlah Peserta Bidang Keahlian Teknik Refrigerasi Domestik Institutional	- Orang		32 Orang	300									32 Orang	300		
								Jumlah Peserta Bidang Keahlian Sepeda Motor Institutional	- Orang		- Orang	-									0 Orang	-		
								Jumlah Peserta Bidang Keahlian Sepeda Motor Non Institutional	- Orang		- Orang	-									0 Orang	-		
								Jumlah Peserta Bidang Keahlian PHP Institutional	- Orang		- Orang	-									0 Orang	-		
								Jumlah Peserta Bidang Keahlian PHP Non Institutional	- Orang		- Orang	-									0 Orang	-		
								Jumlah CPMI Bidang Keahlian Pengurus Bayi	- Orang		48 Orang	450									48 Orang	450		
								Jumlah CPMI Bidang Keahlian Pengurus Lansia	- Orang		32 Orang	300									32 Orang	300		
					Jumlah CPMI Bidang Keahlian Asisten Rumah Tangga	- Orang		48 Orang	450									48 Orang	450					
					Jumlah CPMI Bidang Keahlian Kecantikan	- Orang		32 Orang	300									32 Orang	300					

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
									2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
								Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n					560 Orang	6.000	560 Orang	6.000	560 Orang	6.000	560 Orang	6.000	2240 Orang	24.000	BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
		2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana	Jumlah lembaga dan sektor swasta yang melakukan kerjasama untuk penyediaan instruktur	- Lembaga	-	5 Lembaga	100									5 Lembaga	100			
								Jumlah peserta yang melaksanakan sinergitas pelatihan kerja	- Orang	-	12 Orang	100	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	12 Orang	100			
								Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n					30 Lembaga	300	30 Lembaga	300	30 Lembaga	300	30 Lembaga	300	120 Lembaga	1.200			
		2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana Pelatihan (BLK dan LPK)	- Unit	-	30 Unit	250									30 Unit	250			
								Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja					20 Unit	640	20 Unit	790	20 Unit	740	15 Unit	765	75 Unit	2.935			
		2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK / BLKK yang dibina	55 Lembaga	50	25 Lembaga	100	126 Lembaga	300	126 Lembaga	400	126 Lembaga	485	126 Lembaga	600	529 Lembaga	1.885			
		2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Peserta Bimtek Tata Kelola Izin Operasional LPK Swasta/BLK Komunitas	25 Orang	50	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-			
								Jumlah LPK Swasta / BLK Komunitas yang dibina	- Lembaga	-	25 Lembaga	100									25 Lembaga	100			
								Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina					126 Lembaga	300	126 Lembaga	400	126 Lembaga	485	126 Lembaga	600	504 Lembaga	1.785			
		2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Rekomendasi Perizininan	- Lembaga	-	25 Lembaga	300	10 Perizinan	50	10 Perizinan	50	10 Perizinan	50	10 Perizinan	50	65 Perizinan	500			
		2	07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Perizinan LPK Swasta/BLK Komunitas	- Lembaga	-	15 Lembaga	200									15 Lembaga	200			
								Jumlah lembaga yang diverifikasi	- Lembaga	-	10 Lembaga	100										10 Lembaga			100
								Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi					10 Perizinan	50	10 Perizinan	50	10 Perizinan	50	10 Perizinan	50	40 Perizinan	200			
		2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	- Perusahaan	-	100 Perusahaan	550	10 Perusahaan	150	10 Perusahaan	150	10 Perusahaan	150	10 Perusahaan	150	140 Perusahaan	1.150			
		2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah peserta forum peningkatan produktivitas	- Orang	-	40 Orang	300										40 Orang			300
								Jumlah Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil	- Perusahaan	-	75 Perusahaan	150										75 Perusahaan			150
						Jumlah Peserta Pemagangan dalam negeri yang difasilitasi	- Orang	-	20 Orang	100										20 Orang	100				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
									2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
								Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas					10 Perusahaan	150	10 Perusahaan	150	10 Perusahaan	150	10 Perusahaan	150	40 Perusahaan	600			
		2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perusahaan Kecil	100 Perusahaan	250	200 Perusahaan	1.130	2 Dokumen	60	2 Dokumen	60	2 Dokumen	60	2 Dokumen	60	208 Dokumen	1.370			
		2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Alumni Pelatihan	25 Orang	150	- Orang	-									- Orang	-			
								Jumlah Perusahaan yang dibina untuk Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Penghargaan Sidhakarya/Paramakarya	2 Perusahaan	-	2 Perusahaan	60									2 Perusahaan	60			
								Jumlah Peserta Rakor Kepala Desa dalam rangka kerjasama pelatihan	25 Orang	100	- Orang	-										- Orang			-
								Jumlah Peserta Pemagangan pada UMKM / Pelaku Ekonomi Kreatif	- Orang	-	10 Orang	220										10 Orang			220
								Jumlah Rapat Koordinasi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Orang	-	50 Orang	100										50 Orang			100
								Jumlah Peserta Pelatihan Life Skill pada kawasan unggulan																	
								- Pelatihan Bahasa pemandu geo wisata dikawasan CPU/GG	- Orang	-	40 Orang	400										40 Orang			400
								- Pelatihan Geo Kuliner dikawasan CPU/GG	- Orang	-	40 Orang	250										40 Orang			250
								- Pelatihan Geo Produk dan Ekonomi Kreatif	- Orang	-	20 Orang	100										20 Orang			100
								Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah					2 Dokumen	60	2 Dokumen	60	2 Dokumen	60	2 Dokumen	60	8 Dokumen	240			
		2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	27 %	2.585	28 %	6.210	29 %	5.915	30 %	6.140	31 %	6.140	32 %	6.140	32 %	30.545			
		2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang diserap	1024 Orang	1.520	1.793 Orang	4.965	1.552 Orang	4.565	1.645 Orang	4.790	1.645 Orang	4.790	1.645 Orang	4.790	8.280 Orang	23.900			
		2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah BKK yang terbina	20 BKK	15	15 BKK	65										15 BKK			65
						Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi					10 Orang	100	15 Orang	100	15 Orang	100	15 Orang	100	55 Orang	400					
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilayani	- Orang	-	100 Orang	100										100 Orang	100				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
									2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
								Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL					100 Orang	200	100 Orang	200	100 Orang	200	100 Orang	200	400 Orang	800	BIDANG PEMEMPATAN TENAGA KERJA	
		2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	- Orang	-	50 Orang	50	50 Orang	100	50 Orang	100	50 Orang	100	50 Orang	100	250 Orang	450		
		2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Fasilitasi Tenaga Kerja Disabilitas yang ditempatkan	- Orang	-	- Orang	-									- Orang	-		
								Perda tentang Disabilitas	- Dokumen	-	- Dokumen	-									- Dokumen	-		
								Jumlah Peserta Pendamping Disabilitas	- Orang	-	20 Orang	50									20 Orang	50		
								Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD					20 Orang	175	20 Orang	175	20 Orang	175	20 Orang	175	80 Orang	700		
		2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Perkerasan Jalan	352 Orang	860	352 Orang	1.000									352 Orang	1.000		
								Jumlah Tenaga Kerja Rabat Beton	264 Orang	645	880 Orang	2.250									880 Orang	2.250		
								Jumlah Tenaga Kerja Tembok Penahan Tanah	- Orang	-	88 Orang	225									88 Orang	225		
								Jumlah Tenaga Kerja Papanisasi	- Orang	-	88 Orang	225									88 Orang	225		
								Jumlah Peserta Pembekalan Wirausaha Budidaya Perikanan Darat	- Orang	-	20 Orang	100									20 Orang	100		
								Jumlah Peserta Pembekalan Wirausaha Bengkel Las	- Orang	-	20 Orang	100									20 Orang	100		
								Jumlah Peserta Pembekalan Wirausaha Menjahit	- Orang	-	20 Orang	100									20 Orang	100		
								Jumlah Peserta Pembekalan Wirausaha Pengolahan Hasil Pertanian	- Orang	-	20 Orang	100									20 Orang	100		
								Jumlah Peserta Pembekalan Wirausaha Sablon	- Orang	-	20 Orang	100									20 Orang	100		
								Jumlah Peserta Pembekalan Wirausaha Budidaya Ikan Koi	- Orang	-	20 Orang	100									20 Orang	100		
								Jumlah Peserta Pembekalan Wirausaha Bengkel Bubut	- Orang	-	20 Orang	100									20 Orang	100		
								Jumlah Peserta Pengolahan Limbah Plastik Menjadi Solar	- Orang	-	20 Orang	100									20 Orang	100		
								Jumlah Peserta Teknologi Tepat Guna Pembuatan Pakan Ternak	- Orang	-	20 Orang	100									20 Orang	100		
								Jumlah Peserta Teknologi Tepat Guna	- Orang	-	20 Orang	100									20 Orang	100		
								Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja					1.372 Orang	3.990	1.460 Orang	4.215	1.460 Orang	4.215	1.460 Orang	4.215	5.752 Orang	16.635		
				2	07	04	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Aplikasi Informasi Pasar Kerja yang Terkelola	- Unit	-	1 Unit	600	1 Unit	650	1 Unit	650	1 Unit	650	1 Unit	650	5 Unit		
		2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Aplikasi SILENT CENTER yang dipelihara dan dikembangkan	- Unit	-	1 Unit	300								1 Unit	300			

BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
									2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
								Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online					1 Dokumen	300	1 Dokumen	300	1 Dokumen	300	1 Dokumen	300	4 Dokumen	1.200			
		2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Peserta sosialisasi IPK Online	- Unit	-	100 Orang	100									100 Orang	100			
								Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)					1.000 Orang	150	1.000 Orang	150	1.000 Orang	150	1.000 Orang	150	4.000 Orang	600			
		2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Event Job Fair	- Kali	-	1 Kali	200									1 Kali	200			
								Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja					200 Orang	200	200 Orang	200	200 Orang	200	200 Orang	200	800 Orang	800			
		2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Penganggur Sementara yang dilatih	268 Orang	1.015	450 Orang	585	425 Orang	600	425 Orang	600	425 Orang	600	425 Orang	600	2.150 Orang	2.985			
		2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Facilitasi Pekerja Migran Indonesia yang Bermasalah (Meninggal, Sakit, Kasus)	8 Orang	15	15 Orang	85									15 Orang	85			
								Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya					30 Orang	175	30 Orang	175	30 Orang	175	30 Orang	175	120 Orang	700			
		2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Peserta Diseminasi Peraturan Tata Cara Kerja Ke Luar Negeri	100 Orang	250	375 Orang	380									375 Orang	380			
								Peserta Rakor P3MI	30 Orang	-	30 Orang	-									30 Orang	-			
								Sinergitas optimalisasi Layanan Terpadu Satu Atap	- Orang	-	20 Orang	50									20 Orang	50			
								Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani					375 Orang	225	375 Orang	225	375 Orang	225	375 Orang	225	1.500 Orang	900			
		2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna (yang dilatih Life Skill)													-	-			
								Jumlah Peserta Budidaya Perikanan Darat	20 Orang	125	- Orang	-										- Orang	-		
								Jumlah Peserta Pembekalan Wirausaha Bengkel Las	20 Orang	125	- Orang	-										- Orang	-		
								Jumlah Peserta Pembekalan Wirausaha Menjahit	40 Orang	250	- Orang	-										- Orang	-		
								Jumlah Peserta Pembekalan Wirausaha Pengolahan Hasil Pertanian	20 Orang	125	- Orang	-										- Orang	-		
								Jumlah Peserta Pengolahan Limbah Plastik Menjadi Solar	20 Orang	125	- Orang	-										- Orang	-		
								Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna (yang mengikuti Pembekalan Kewirausahaan)	- Orang	-	10 Orang	70										10 Orang	70		
								Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan					20 Orang	200	20 Orang	200	20 Orang	200	20 Orang	200	80 Orang	800			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)						
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
		2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing yang dibina	40 Perusahaan	50	75 Perusahaan	60	75 Perusahaan	100	75 Perusahaan	100	75 Perusahaan	100	375 Perusahaan	460				
		2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing yang dibina	50 Perusahaan	50	75 Perusahaan	60	75 Perusahaan	100	75 Perusahaan	100	75 Perusahaan	100	375 Perusahaan	460				
		2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100 %	575	100 %	1.830	100 %	1.930	100 %	1.930	100 %	1.730	100 %	2.080			100 %	9.500
		2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina	10 Lembaga	25	100 Lembaga	280	100 Perusahaan	180	100 Perusahaan	180	100 Perusahaan	180	100 Perusahaan	230			500 Perusahaan	1.050
		2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan	25 Perusahaan	25	75 Perusahaan	60								75 Perusahaan			60	
								Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online					93 Perusahaan	120	95 Perusahaan	120	100 Perusahaan	120	103 Perusahaan	150			391 Perusahaan	510
		2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mengesahkan Perjanjian Kerja Bersama	- Perusahaan	-	25 Perusahaan	120								25 Perusahaan			120	
								Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama					7 Perusahaan	30	7 Perusahaan	30	7 Perusahaan	30	7 Perusahaan	41			28 Perusahaan	131
		2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Profil Kelenagakerjaan	- Dokumen	-	1 Dokumen	100								1 Dokumen			100	
								Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan					50 Laporan	30	50 Laporan	30	50 Laporan	30	50 Laporan	39			200 Laporan	129
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus hubungan Industrial dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis dinamis dan berkeadilan	65 Kasus	550	65 Kasus	1.550	50 Kasus	1.750	55 Kasus	1.750	50 Kasus	1.550	45 Kasus	1.850	265 Kasus	8.450				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
		2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Permasalahan Hubungan Industrial (Kasus)	24 Kasus	350	36 Kasus	50								36 Kasus	50	BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL		
							Peserta Pemilhan Pekerja Teladan (Orang)	50 Orang	-	50 Orang	50									50 Orang	50			
							Peserta Pemilhan Perusahaan Terbaik PembinaPekerja Perempuan (Perusahaan)	50 Perusahaan	-	50 Perusahaan	50									50 Perusahaan	50			
							Facilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten (Rapat Koordinasi dan Honor, Kajian Kebutuhan Hidup Layak dan Kemampuan Perusahaan, Kaji Terap Dewan Pengupahan)	41 Orang	-	41 Orang	300									41 Orang	300			
							Facilitasi Hari Buruh Nasional (persiapan hari buruh nasional,evaluasi hari buruh nasional dan Forum Group Discussion (FGD))	200 Orang	-	500 Orang	150									500 Orang	150			
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah					50 Perkara	800	53 Perkara	800	55 Perkara	750	57 Perkara	900	215 Perkara	3.250			
		2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus hubungan industrial	65 Kasus	50	35 Kasus	50								35 Kasus	50			
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan					35 Perkara	50	40 Perkara	50	40 Perkara	65	45 Perkara	70	160 Perkara	235			
		2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yangterbina	50 Serikat Pekerja	50	50 Serikat Pekerja	500								50 Serikat Pekerja	500			
							Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi					50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	500	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	500	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	385	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	300	200 Asosiasi dan Serikat Pekerja	1.685			
		2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Facilitasi LKS Tripartit (Rapat, Honorarium dan Kaji Terap)	28 Orang	100	28 Orang	200									28 Orang			200
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina					1 Lembaga	200	1 Lembaga	200	1 Lembaga	200	1 Lembaga	250	4 Lembaga	850			
		2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Kepesertaan Jamsostek di perusahaan	- Orang	-	100 Orang	100									100 Orang			100
							Jumlah Perusahaan dan Karyawan yang Memahami Pentingnya Fasilitas Kesejahteraan Pegawai		- Perusahaan	-	100 Perusahaan	100									100 Perusahaan			100

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
									2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					200 Orang	200	200 Orang	200	100 Orang	150	200 Orang	330	700 Orang	880				
Meningkatnya jumlah Transmigrasi yang terfasilitasi	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi	20 %	383	20 %	135	20 %	160	20 %	135	20 %	135	20 %	135	100 %	700				
	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Transmigran yang ditinjau	5 KK	383	5 KK	135	2 Lokasi	160	1 Lokasi	135	1 Lokasi	135	1 Lokasi	135	10 KK	700				
	3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU Kerjasama antar wilayah transmigrasi	1 MOU	20	1 MOU	30									1 MOU	30				
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					2 Laporan	45	1 Laporan	30	1 Laporan	30	1 Laporan	30	5 Laporan	135				
	3	32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Lokasi yang ditinjau dan Bina	1 Lokasi	25	1 Lokasi	25										1 Lokasi	25			
							Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)					2 Dokumen	30	1 Dokumen	25	1 Dokumen	25	1 Dokumen	25	5 Dokumen	105				
	3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang ditempatkan ke luar pulau jawa	5 KK	28	5 KK	40										5 KK	40			
							Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan					10 Kepala Keluarga	55	5 Kepala Keluarga	35	5 Kepala Keluarga	35	5 Kepala Keluarga	35	25 Kepala Keluarga	160				
	3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah masyarakat transmigrasi lokal yang terbina	5 Lokasi	310	- Lokasi	-										- Lokasi	-			
							Jumlah Sosialisasi Informasi Program Transmigrasi (Kecamatan)	- Kecamatan	-	47 Kecamatan	30										47 Kecamatan	30			
							Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan					25 Kepala Keluarga	15	25 Kepala Keluarga	25	25 Kepala Keluarga	25	25 Kepala Keluarga	25	25 Kepala Keluarga	25	100 Kepala Keluarga	90		
	3	32	03	2.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang terlatih	- KK	-	5 KK	10										5 KK	10			
							Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan					10 Orang	15	10 Orang	20	10 Orang	20	10 Orang	20	10 Orang	20	40 Orang	75		
	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih	16,6 %	13	16,6 %	350	20,0 %	350	20,4 %	350	21,2 %	350	21,8 %	350	21,8 %	350	100 %	1.750		
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	200 Orang	13	250 Orang	350	175 Kepala Keluarga	350	175 Kepala Keluarga	350	175 Kepala Keluarga	350	175 Kepala Keluarga	350	175 Kepala Keluarga	350	950 Kepala Keluarga	1.750			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Transmigrasi	30 Orang	13	- Orang	-								- Orang	-		
							Jumlah KK Masyarakat Translok yang dibina	- KK	-	205 KK	300								205 KK	300			
							Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina					175 Kepala Keluarga	290	175 Kepala Keluarga	290	175 Kepala Keluarga	290	175 Kepala Keluarga	290	700 Kepala Keluarga	1.160		
		3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Lokasi Penempatan Trans Asal Kab. Sukabumi yang terbina di Luar Pulau Jawa	- Lokasi	-	1 Lokasi	50									50		
							Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial,						1 Satuan Permukiman	60	1 Satuan Permukiman	60	1 Satuan Permukiman	60	1 Satuan Permukiman	60	4 Satuan Permukiman		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan ke dalam tabel berikut ini :



Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020 (Realisasi)	2021 (Proyeksi)	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		90	92	94	96	98	100	100
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota		27	28	29	30	31	32	32
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,0	3,0
5	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi		20	20	20	20	20	20	100
6	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih		16,6	16,6	20	20,4	21,2	21,8	100



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Sukabumi tahun 2021 – 2026 ini merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Disnakertrans Kabupaten Sukabumi adalah sebagai pedoman (guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Disnakertrans dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kabupaten Sukabumi.

Maka penyusunan Renstra OPD merupakan masukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Bappeda Kabupaten Sukabumi dalam penyusunan RKPD, KUA- PPAS. Perubahan terhadap isinya hanya akan dilakukan bila terjadi keadaan yang benar-benar di luar dugaan, seperti bencana alam, fluktuasi harga pasar dan adanya kebijakan nasional dan provinsi yang perlu diakomodir oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi.



Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 yang akan menjadi acuan atau pedoman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan seluruh kegiatannya tahun 2021 – 2026.

Sukabumi, 2022

Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sukabumi



USMAN JAELANI, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641207 199503 1 001